

RENCANA KERJA PERUBAHAN TA.2023



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA CIMAHI
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Alloh SWT, akhirnya dokumen rencana kerja perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini merupakan Renja Perubahan yang beriringan dengan perubahan status Kantor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan kedua tahun berjalan, seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang dijadikan sebagai acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023, maka rencana kerja perubahan ini dibuat.

Dengan berakhirnya pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia turut menjadi pertimbangan di dalam melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta penganggaran untuk seluruh program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat berhasil guna serta berdaya guna.

Cimahi, Agustus 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA CIMAHI



MARDI SANTOSO, S., Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19740919199311 1003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK S.D TW II TAHUN BERJALAN	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan II tahun berjalan	10
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS	14
3.1 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cimahi	14
3.2 Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cimahi	24
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan	27
BAB IV : KERANGKA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	29
4.1. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan.	29
4.2. Rumusan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan	31
BAB V : PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
Tabel 2.1. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH s.d. TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023.	
Tabel 4.1. RUMUSAN RENCANA PAGU PERUBAHAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah, dengan melibatkan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja-Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Cimahi dengan tugasnya melaksanakan urusan dibidang pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja-Perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2023.
3. Renja-Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 yang merupakan tahun pencapaian ke-1 atau periode awal dari RPD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.
4. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja-Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II atau semester pertama tahun

2023, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu yaitu periode 1 (satu) tahun anggaran.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2 Landasan Hukum.

Peraturan yang menjadi dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 6 Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 47);
26. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 47);

27. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 645, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);
28. Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023
29. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2012-2017.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi disusun dengan maksud :

- a. Dokumen rencana yang disusun untuk periode satu tahun yang berpedoman pada Renstra, RKPD dan Perubahan RPD yang memberikan gambaran untuk pelaksanaan tugas agar lebih lancar dan terkendali.
- b. Menyiapkan acuan/pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam menentukan prioritas program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Cimahi.
- c. Dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya.
- d. Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan II atau semester pertama tahun 2023, dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah :

- a. Mewujudkan visi dan misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi kedalam rencana kegiatan Pembangunan.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan hingga monitoring dan evaluasi.
- c. Dapat dijadikan pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.
- e. Memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Perubahan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN.

Pada Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

BAB III GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI DAN PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS.

Bab ini memuat tentang gambaran umum pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dan isu-isu strategis.

BAB IV KERANGKA PENDANAAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab Ini memuat tentang penetapan program dan kegiatan serta kerangka pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

BAB V PENUTUP.

Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2023)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi secara operasional terbagi kedalam beberapa tugas fungsi, sebagaimana struktur Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai berikut :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

Sesuai rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sampai dengan triwulan II Tahun 2023, secara umum realisasi kinerja program dan kegiatan dapat dibaca dan dilihat sebagaimana terlampir dalam tabel 2.1.

Tingkat realisasi capaian keuangan dipengaruhi oleh proses pencairan beberapa sub kegiatan yang lintas bulan walaupun kegiatan telah dilaksanakan dibulan sebelumnya, secara garis besar dapat disampaikan gambaran singkat masing-masing realisasi program dan kegiatan dengan beberapa analisa sebagai berikut :

Adapun capaian kinerja untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan serta Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, secara keseluruhan rata-rata kegiatan telah dilaksanakan dan tersisa beberapa kegiatan yaitu sosialisasi dan rakor Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Kota Cimahi, rapat koordinasi dengan forum-forum kerukunan umat beragama dan forum pembauran kebangsaan yang keseluruhannya bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan keutuhan nilai-nilai ideologi pancasila dan faham wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tetap terpelihara dan terwujudnya kerukunan antar umat beragama, selain itu sebagai usulan hasil dari musrenbang bersama dengan masyarakat di Wilayah Kota Cimahi dalam rangka mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang bertujuan mewujudkan Cimahi yang bersih dari narkoba dan obat-obatan terlarang maka dipandang perlu berkoordinasi dengan lembaga vertikal BNNK Kota Cimahi dalam kegiatannya di tahun 2023 ini.

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, bersifat insidentil, antisipatif dan koordinatif sehingga segala persiapan pelaksanaan kegiatan perlu adanya koordinasi yang kontinu dan terus menerus baik dengan tim terpadu penanganan konflik sosial maupun dengan unsur kominda sebagai lembaga vertikal dalam rangka mewujudkan kondusifitas ketentraman dan keamanan wilayah Kota Cimahi.

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik untuk sub kegiatan pencairan bantuan keuangan bagi partai politik untuk Tahun 2023 semua proposal pengajuan bantuan keuangan bagi Partai Politik telah memasuki tahap verifikasi dokumen pengajuan bantuan keuangan oleh tim

verifikasi bantuan keuangan bagi partai politik dengan beberapa catatan ada beberapa partai politik yang masih perlu melengkapi dokumen pengajuan bantuan keuangannya, namun karena adanya permohonan kenaikan nominal satuan persuara menyebabkan bantuan keuangan ini belum terealisasi. Selain itu juga dalam rangka tahap persiapan pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 di Indonesia perlu adanya koordinasi bersama dengan lembaga vertikal KPU dan Bawaslu Kota Cimahi melalui fasilitasi kegiatan bagi masing-masing lembaga vertikal KPU dan Bawaslu Kota Cimahi dan telah terealisasi keseluruhannya yaitu sewa ruangan kantor Bawaslu Kota Cimahi dan Hibah Keuangan untuk memfasilitasi kegiatan KPU Kota Cimahi.

Capaian kinerja untuk Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, sampai dengan akhir triwulan II dilaksanakan sesuai jadwal dengan memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan, namun dengan tetap dilakukan monitoring dan pembinaan/pelatihan kepada organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi sebanyak 100 (seratus) Organisasi Kemasyarakatan dan monitoring dalam rangka menertibkan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Cimahi melalui pencatatan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian sesuai kebutuhan, walaupun ada beberapa sub kegiatan yang memerlukan perhatian seperti ketersediaan sarana prasarana namun penganggarannya belum optimal.

Sehingga dapat disampaikan bahwa hingga akhir semester I atau akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2023, rata-rata realisasi capaian kinerja program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebesar 51,39%, sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangan adalah sebesar 42,26% atau sebesar Rp. 5.247.830.182,- (lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta

delapan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 12.418.395.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SERTA PENETAPAN ISU-ISU
STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI

3.1 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

I. Sumber Daya Manusia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu unsur Perangkat Daerah Kota Cimahi yang membantu Kepala Daerah Kota Cimahi dalam urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cimahi lebih lanjut dituangkan kedalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi saat ini adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Orang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang ASN dan 3 (tiga) Orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Berikut sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan eselonering, pangkat/golongan ruang dan jenjang pendidikan, sebagaimana tercantum didalam tabel dibawah ini :

**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan jabatan, golongan, pendidikan dan kedudukan**

No	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Jml h	Jenjang Pendidikan	Jml h	Kedudukan	Jml h
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Badan	IV/c	1	S1	1	Esl. II	1
2	Sekretaris	IV/b	1	S2	1	Esl. III.a	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	1	S1	1	Esl. IVa	1
4	Kasubag Program, Anggaran, dan Keuangan	III/d	1	S1	1	Esl. IVa	1
5	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	IV/a	1	S2	1	Esl. IIIb	1
6	Kasubid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	III/d	1	S1	1	Esl. IVa	1
7	Kasubid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	III/d	1	S1	1	Esl. IVa	1
8	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	IV/a	1	S2	1	Esl. IIIb	1
9	Kasubid Politik Dalam Negeri	III/d	1	S2	1	Esl. IVa	1
10	Ksubid Organisasi Kemasyarakatan	III/d	1	S2	1	Esl. IVa	1
11	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	IV/a	1	S2	1	Esl. IIIb	1

12	Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	III/d	1	S2	1	Esl. IVa	1
13	Ksubid Penanganan Konflik	III/d	1	S2	1	Esl. IVa	1
14		III/d	1	S1	1	Fungsional Umum	1
15		III/c	1	S2	1	Fungsional Umum	1
16		III/c	1	S1	1	Fungsional Umum	1
17		III/b	2	S1	2	Fungsional Umum	2
18		III/b	1	D3	1	Fungsional Umum	1
19		III/a	2	S1	2	Fungsional Umum	2
19		II/d	5	SLTA	4	Fungsional Umum	5
20		THL	1	S1	1	THL	1
21		THL	2	SLTA	2	THL	2
		Jumlah	29	Jumlah	29	Jumlah	29

Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, Golongan III sebanyak 16 (empat belas) orang dan Golongan II sebanyak 5 (lima) orang serta tenaga harian lepas (THL) sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari 9 (sembilan) orang pasca sarjana, 10 (sepuluh) orang Sarjana, 1 (satu) orang pendidikan Diploma dan 2 (dua) orang setingkat SLTA.

Semenjak penyesuaian nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ditetapkan, terdapat beberapa posisi jabatan yang masih kosong, yaitu 1 (satu) orang Pengelola Barang Milik Daerah, 1 (satu) orang pranata kearsipan, 1 (satu) orang pengadministrasi umum, 1 (satu) orang analis rencana program dan kegiatan, 1 (satu) orang pengadministrasi perencanaan dan program,

1 (satu) orang Analis Wawasan Kebangsaan, 1 (orang) pengelola data, 1 (satu) orang Analis Sosial Budaya, 1 (satu) orang pengelola data, 1 (satu) orang pengelola bahan demokratisasi dan pemilu, 3 (satu) orang pengelola pemantauan, 1 (satu) orang pengolah data kelembagaan, 1 (satu) orang pengelola data, 1 (satu) orang analis intelejen, 1 (satu) orang analis humas. Total kekosongan kelas jabatan sebanyak 16 kelas jabatan.

II. Sumber Daya Asset.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi selain didukung oleh aparatur sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, selain itu juga tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya berproses menyesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud. Sampai dengan saat ini masih terdapat sarana-sarana teknis yang belum memadai, tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sangat memperhatikan terhadap kepentingan sarana dan prasarana tersebut sehingga selalu berupaya untuk mengoptimalkan anggarannya untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Sebagai gambaran, berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

- a.** Bangunan : Beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi, Gedung C Lantai 4 dan Lantai 1.

- b.** Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

Data Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas Mobil merk toyota avanza	1		1
2	Kendaraan Dinas Mobil merk toyota rush	1		1
2	Kendaraan Dinas Sepeda Motor merk Honda vario	2		2
3	Laptop	4	1	5
4	Komputer PC	13	2	15
5	Printer	9	2	5
6	Televisi	1	2	3
7	Infocus	1	1	2
8	Layar	1		1
9	Lemari filling kabinet	4		4
10	Laci filling kabinet	2	4	6
11	Kursi Kerja	14		14
12	Sofa	2		2
13	Meja Kerja	17		17
14	Telepon/Faximile	1		1
15	Intercom	3	1	4
16	Kursi citos	11	1	11
17	AC	2	1	3
18	Scanner	2		2
19	Rak Arsip	2		2
20	Penghancur kertas	1	2	3
21	Whiteboard	2		2

22	Papan Pengumuman	1		1
23	Plang Struktur Organisasi	1		1
24	Kompor Gas		1	1
25	Tabung gas	1		1
26	Galon	4		4
27	Gorden Set	3		3
28	CCTV	3		3
30	Kamera		1	1
31	Kursi Tunggu Pelanggan	3		3
32	Bendera Cimahi	1		1
33	Bendera Merah Putih	1		1
34	Fingerscan Pintu Masuk	1		1

III. Gambaran Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Wali Kota dibidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi memberikan sejumlah layanan, baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

1. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Kantor;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program;
- 4) Penyusunan laporan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan dan barang;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan;

- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan;
- 11) Penyelenggaraan kesekretariatan;
- 12) Pelayanan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi;
- 13) Pengelolaan data kepegawaian;
- 14) Penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- 15) Pelaksanaan urusan kepegawaian pegawai;
- 16) Pelaksanaan tugas-tugas yang diperintahkan pimpinan.

2. Pelayanan Eksternal

- 1) Pemberian surat pengantar ijin penelitian/PKL/Magang;
- 2) Pemberian surat keterangan tercatat kepada organisasi kemasyarakatan;
- 3) Fasilitasi Bawaslu Kota Cimahi;
- 4) Fasilitasi KPU Kota Cimahi;
- 5) Fasilitasi P4GN Kota Cimahi;
- 6) Fasilitasi Pusat Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kota Cimahi;
- 7) Fasilitasi lembaga penganut aliran kepercayaan masyarakat di Kota Cimahi;
- 8) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (Kominda) dan Forkopimda;
- 9) Fasilitasi tim pemantauan/monitoring wilayah Kota Cimahi;
- 10) Fasilitasi tim GNRM;
- 11) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 12) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 13) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 14) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 15) Fasilitasi upaya pengembangan serta memelihara/menjaga nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila dan wawasan

- kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- 16) Fasilitasi partai politik melalui bantuan keuangan partai politik dan pencatatan keberadaan partai politik baru;
 - 17) Fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat;
 - 18) Fasilitasi pendidikan politik perempuan.

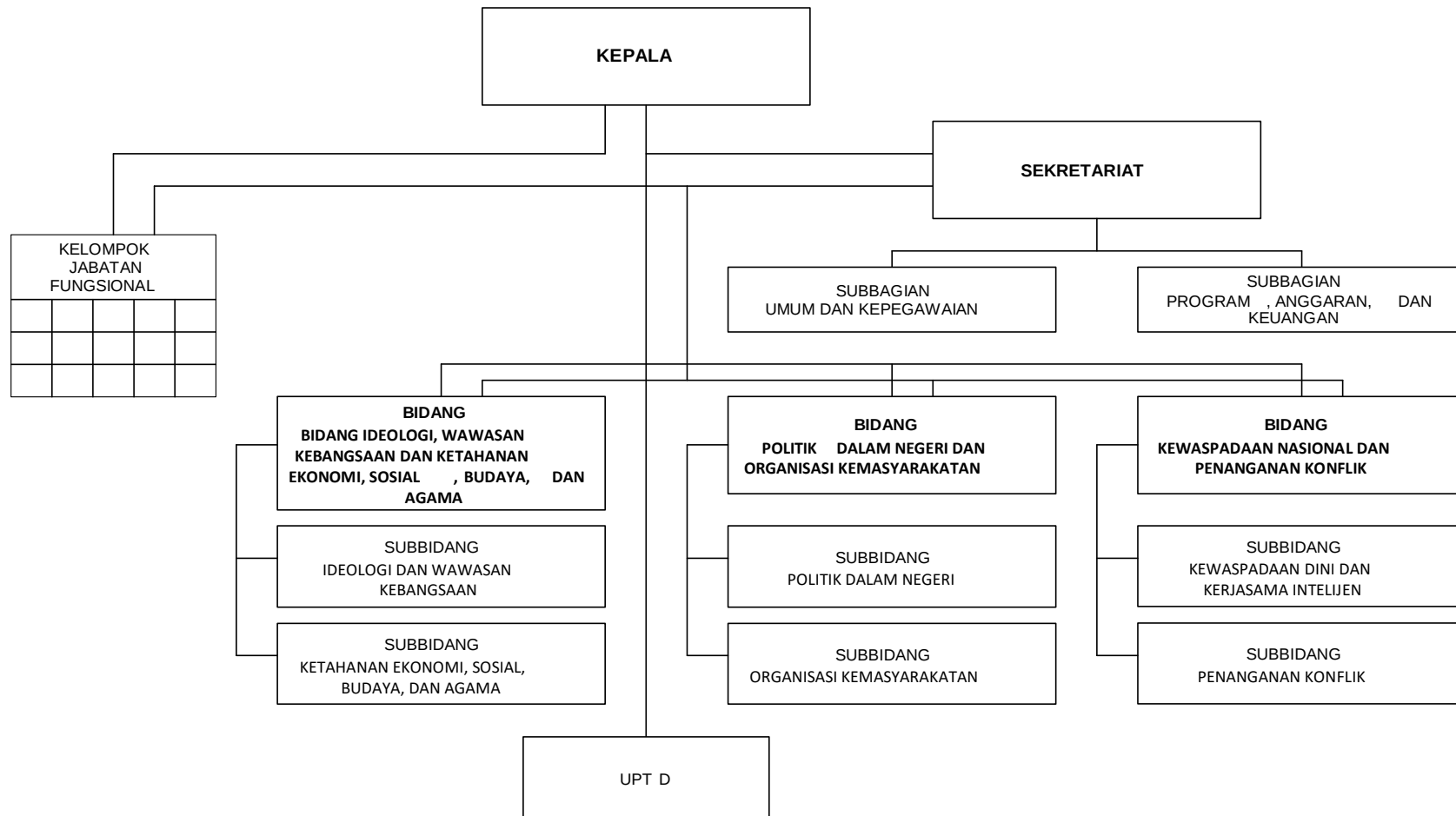
Sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kota Cimahi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, sehingga di dalam melaksanakan urusannya tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
- e. serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;
- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota.

Adapun secara susunan struktur Organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi terdiri dari :

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi



3.2 Penetapan Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Didalam penyusunan renja perubahan Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, beberapa isu strategis masih mengacu kepada RPD Tahun 2023-2026, serta mengacu kepada keselarasan beberapa indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu :

1. Kaitan dengan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, adalah persiapan tahapan pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia Tahun 2024;
2. Kaitan Dengan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, era globalisasi telah mendorong perubahan pola pikir masyarakat indonesia secara keseluruhan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik dan ideologi, keterbukaan dan prinsip dapat menyuarakan kehendak/aspirasi masyarakat yang juga turut didorong oleh peristiwa reformasi kepemimpinan pada tahun 1998, memunculkan banyak lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan serta organisasi-organisasi partai politik yang pada akhirnya ikut menjadi pemenang didalam pemilihan umum anggota legislative masih banyaknya perubahan atau terbentuknya regulasi baru yang mengatur berbagai hal, dapat berdampak pada jalannya pelaksanaan urusan badan kesatuan bangsa dan politik kota cimahi kedepannya;
3. Kaitan Dengan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, letak geografis Kota Cimahi adalah merupakan

daerah yang saling berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya sekaligus sebagai daerah penyangga Ibukota Provinsi Jawa Barat sebagai metropolitan Jawa Barat, sehingga berdampak tingginya mobilitas penduduk baik yang menetap, pendatang atau sementara, mendorong peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Cimahi bagi masyarakatnya diberbagai bidang, selain itu pula sebagaimana halnya fenomena kondisi kota metropolitan pada umumnya memudahkan timbulnya potensi kerawanan keamanan ketertiban ditengah masyarakat seperti munculnya masalah-masalah ekonomi, yang memicu terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba, konflik horizontal ditengah masyarakat yang dipicu perbedaan ideologi ataupun menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama maupun penghayat kepercayaan.

4. Kaitan Dengan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, masih diwarnai pengaruh era globalisasi serta kemajuan teknologi membawa berbagai informasi yang berpengaruh juga pada pola pikir/ideologi di masyarakat, sehingga dapat berpotensi mengganggu kondusifitas dan stabilitas keamanan serta ketertiban wilayah Kota Cimahi. Menurut data BPS pada tahun 2020 Kota Cimahi tercatat sebagai salah satu Kota dengan jumlah penduduk padat di Jawa Barat, yang berpotensi menambah angka pengangguran sehingga menimbulkan kerawanan terhadap ketahanan ekonomi dan sosial, seperti unjuk rasa buruh, dsb.
5. Kaitan Dengan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, isu strategis terkait fungsi kesatuan bangsa dan politik tidak terlepas dari aspek pancagatra yang dalam perpustakaan lembaga ketahanan nasional RI mengandung pengertian tugas menjaga stabilitas keamanan ketentraman Wilayah Kota Cimahi

dari potensi gangguan keamanan dan ketertiban Wilayah Kota Cimahi dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketentraman Wilayah Kota Cimahi, sehingga sangat perlu adanya kemitraan untuk mewujudkan langkah antisipasi bersama dengan berbagai pemangku kepentingan maupun instansi vertikal yang terkait dengan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik.

6. Kaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, adalah pada Tahun 2023 ini meningkatnya status Kantor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga diperlukan faktor penunjang baik sarana prasarana maupun peningkatan kapasitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Penetapan isu-isu strategis dipengaruhi pula oleh permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dimasa masih terjadinya pandemi Covid 19 sehingga beberapa penempatan anggaran masih difocussing dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

II. Peluang.

1. Letak geografis Kota Cimahi;
2. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah yang didelegasikan memangku urusan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Adanya kebijakan pemerintah pusat sebagai dasar kewenangan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

4. Adanya sinergitas serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan maupun instansi vertikal yang terkait dengan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik;
5. Dilaksanakannya secara kontinu koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan (*Stakeholder*);
6. Data dan Informasi partai politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) cukup tersedia;
7. Adanya data cimahi dalam angka dari BPS Kota Cimahi;
8. Tersedianya jaringan sistem informasi;
9. Adanya pelanggan pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan;
11. Adanya sarana dan prasarana;
12. Adanya Sumber Daya Manusia;

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Tujuan :

1. Menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat tentang menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila dan faham wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menyelenggarakan pembinaan kepada Masyarakat/ lembaga/komponen masyarakat tentang hak, kewajiban dalam kehidupan berpolitik yang harmonis dalam suasana yang demokratis;
3. Meminimalisir potensi konflik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta keamanan ketertiban di wilayah Kota Cimahi;
4. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan;

5. Meningkatnya fasilitasi kegiatan bagi organisasi kemasyarakatan/lembaga/komponen masyarakat dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
6. Meningkatnya koordinasi dengan instansi vertical / Masyarakat / lembaga/komponen masyarakat/forum dalam rangka penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban diwilayah Kota Cimahi;
7. Meningkatkan indeks profesionalitas ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi;

Sasaran :

1. Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat tentang menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila dan faham wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat/lembaga/komponen masyarakat tentang hak, kewajiban dalam kehidupan berpolitik yang harmonis dalam suasana yang demokratis;
3. Menurunnya potensi konflik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta keamanan ketertiban di wilayah Kota Cimahi;
4. Terawasi dan terbinanya organisasi kemasyarakatan;
5. Terfasilitasinya kegiatan bagi organisasi kemasyarakatan / Lembaga / komponen masyarakat dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
6. Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertical / Masyarakat / lembaga/komponen masyarakat/forum dalam rangka penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban diwilayah Kota Cimahi;
7. Meningkatnya indeks profesionalitas ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi

BAB IV

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Dari formulasi isu-isu penting diatas terdapat beberapa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sehingga penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang direncanakan dalam perubahan rencana kerja (renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mengacu pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan akhir semester Tahun 2023;
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi;
4. Target Capaian visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih Kota Cimahi periode Tahun 2023-2026 yang diselaraskan pada masing-masing rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah termasuk perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja (renja) sampai akhir triwulan II Tahun Anggaran 2023, mengingat masih di dalam kondisi penanganan pandemi Covid-19, dalam rangka mendukung refocussing anggaran bagi penanganan pandemi Covid-19 di Kota Cimahi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pada rencana kerja (renja) perubahan Tahun Anggaran 2023 melakukan pergeseran/perubahan anggaran secara internal yang dilakukan bagi program-program yang belum tuntas penetapan target pencapaian dalam 1 (satu) tahun berjalan, serta penambahan anggaran pada program-program yang merupakan gagasan atau usulan dari stakeholder yang menjadi prioritas tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Maka program dan kegiatan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu sebagaimana terlampir didalam tabel 4.1. mengenai rumusan rencana program dan kegiatan serta pagu anggaran perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 beserta indikator kinerja berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

4.2 Rumusan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan.

Dengan pertimbangan telaahan evaluasi serta usulan program dan kegiatan sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023, maka rencana kerja perubahan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu sebagaimana terlampir didalam **tabel 4.1. mengenai Rumusan Rencana Pagu Perubahan Serta Program Dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023**, beserta indikator kinerja berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Demikian Renja-Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 ini disusun semoga dapat bermanfaat dan dapat dijalankan dengan baik.

Cimahi, Agustus, 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA CIMAHI



MARDI SANTOSO, S., Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19740919199311 1003

EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2022

N O	KODE REKENI NG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	TARGET	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		KET
								FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	8.01.02	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			445.803.100	100%	416.759.400	
				Jambore Wawasan Kebangsaan	1 Kali	50 Orang		1 Kali		
				Penyuluhan tentang ketaatan hukum dalam rangka pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila	6 Kelurahan	45 Orang = 270 Orang		6 Kali		
				Seminar Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali	50 Orang		1 Kali		
				Fasilitasi Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Kota Cimahi	3 Kali	3 x 30 Orang		3 Kali		
				Fasilitasi Peningkatan dalam rangka peningkatan wawasan Forum Pembauran Kebangsaan Ke luar Kota Cimahi	1 Kali	30 Orang		1 Kali		
2	01.05	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			259.682.600	100%	233.380.000	
				Sosialisasi Koordinasi Penghayat Aliran Kepercayaan Masyarakat (Korpakem)	2 Kali	50 Orang = 100 Orang		2 Kali		
				Fasilitasi Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi	3 Kali	3 x 25 Orang		3 Kali		

3	01.06	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Fasilitasi Peningkatan dalam rangka peningkatan wawasan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi	1 Kali	25 Orang		1 Kali		
				Hibah kepada BNN	1 Kali	250 Juta		1 Kali		
							1.793.904.000	98%	1.688.301.000	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			161.414.000	100%	145.450.000	
				Pembentukan FKDM Tingkat Kecamatan di Kota Cimahi	3 Kali	Pembentukan FKDM Tk. Kec (3 Kec @ 27 Orang		3 Kali		
				Lidpangal	1 2 Bulan	Anggota Kepolisian, kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan		1 2 Bulan		
				Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah	3 Kali	@ 40 Orang		3 Kali		
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			1.632.490.000	97%	1.542.851.000	
				Fasilitasi Pertemuan Timdu PKS Kota Cimahi	1 8 Kali	Tim terpadu penanganan konflik sosial		1 7 Kali		
				Pemantauan dan Pengamanan Wilayah	1 2 Kali	Instansi Vertikal		1 2 Kali		

4	8.01.03	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2.179.094.450	100%	2.123.856.450	
				Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Bawaslu tema Pengawasan Partisipatif Pemilu	2	Kali	@50 Orang	2 Kali		
				Sewa gedung Bawaslu	1	Unit	1 Unit gedung kantor Bawaslu	1 Unit		
				Fasilitasi Sosialisasi KPU mengenai Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Masyarakat	3	Kali	@ 75 Orang	3 Kali		
				Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan Tk. Kota Cimahi	1	Kali	@ 50 Orang	1 Kali		
				Fasilitasi Rapat TP3D Kota Cimahi	3	Kali		3 Kali		
				Bantuan Keuangan Parpol	10	Parpol	10 Parpol	10 Parpol		
5	8.01.04	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			484.506.100	100%	413.210.000	
				Pembinaan Hukum Bagi Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat	4	Kali	103 Ormas	4 Kali		
				LDK Bagi Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	2	Kali	@ 50 Ormas	2 Kali		
				Fasilitasi Bagi Organisasi Kemasyarakatan	45	Ormas	45 Ormas	45 Ormas		
				Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keormasan	0	Unit		0 Unit		
6	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.496.214.958	100%	4.021.664.154	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Renja Murni, Perubahan, Renstra Perubahan	2 Dokumen	3.037.500	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	LKIP, LKPJ	2 Dokumen	3.378.500	

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 4	Bulan		4.845.244.508	1 4	Bulan	3.417.491.664	
					2 7	ASN	27 ASN		2 7	ASN		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 2	Bulan		83.080.000	1 2	Bulan	70.850.908	
					3	THL Yang Diperbantukan	3 THL			3		THL
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 2	12 Bulan	12 Bulan	130.738.900	1 2	Bulan	118.484.300	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 2	Bulan	12 Bulan	37.329.000	1 2	Bulan	36.907.500	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 2	Bulan	12 Bulan	14.944.850	1 2	Bulan	14.942.750	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 2	Bulan	12 Bulan	172.773.000	1 2	Bulan	172.557.952	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	1 Bulan	30.000.000	1	Unit	29.500.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 2	Bulan	12 Bulan	6.000.000	1 2	Bulan	561.201	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 2	Bulan	12 Bulan	16.220.000	1 2	Bulan	13.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 2	Bulan		42.783.200	1 2	Bulan	35.261.948	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 2	Bulan		47.375.000	1 2	Bulan	44.016.331	
PAGU TOTAL DAN REALISASI :								10.659.205.208	99,74%	8.897.171.004	83,47 %	

TABEL 2.1
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2023

N O	KOD E REK	PROGR AM	KEGIATA N/SUB KEGIATA N	TARGET KINERJA	INDIKATO R	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU ANGGAR AN (Rp)	REALISASI				KET.	
										FISIK	(%) FIS IK	KEUANGA N (Rp)	(%) KE U		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								17 Kegiatan dan 1225 Orang	446.953.100	11 Kegiatan dan 935 Orang	76,3%	209.194.400	46,8%		
1	8.01.02	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jambore Wawasan Kebangsaan		1 Kali = 100 Orang			0			0%	
						Penyuluhan tentang ketaatan hukum dalam rangka pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila		7 Kelurahan @ 50 Orang = 350 Orang		7 Kelurahan @ 50 Orang = 350 Orang	100%				
						Saresehan/Silaturnahmi Kebangsaan		1 Kali @ 400 Orang		1 Kali @ 400 Orang	100%				
						Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Kota Cimahi		4 Kali @ 30 Orang = 120 Orang		2 Kali @ 30 Orang = 60 Orang	50%				
			SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,			Peningkatan wawasan Forum Pembauran Kebangsaan Ke luar Kota Cimahi		1 Kali @ 30 Orang = 30 Orang		0	0%				

			Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa n, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa n			Pelaksanaan PHBN (Peringatan Harlah Pancasila)		1 Kali = 125 Orang		1 Kali = 125 Orang	100 %			
						Sosialisasi RAN GNRM		1 Kali @ 50 Orang		0	0%			
						Raker RAN GNRM		1 Kali @ 50 Orang		0	0%			
								11 Kegiatan dan 580 Orang	261.962.600	7 Kegiatan dan 325 Orang	56,0 %	114.875.000	43,9 %	
2	01.05	Pembinaa n Dan Pengemba ngan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksanan ya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagun aan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi Koordinasi Penghayat Aliran Kepercayaan Masyarakat (Korpakem)	Masyarakat/Kelo mpok Masyarakat/Foru m/ Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga	2 Kali @ 75 Orang = 150 Orang		1 Kali @ 75 Orang = 75 Orang	50%			
						Fasilitasi Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi		5 Kali @ 50 Orang = 250 Orang		2 Kali @ 50 Orang = 100 Orang	40%			
			SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika,			Fasilitasi P4GN / Launching Kelurahan Bersinar di 3 Kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat kota cimahi		3 Kali @ 50 Orang = 150 Orang		3 Kali @ 50 Orang = 150 Orang	100 %			
						Peningkatan wawasan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi		1 Kali @ 30 Orang		0	0			

			Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
3, 1	01.06	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Lidpamgal Pelatihan dasar-dasar intelijen bagi pengurus FKDM Kota dan Kecamatan Fasilitasi Rapat FKDM Peningkatan wawasan Pengurus FKDM Tingkat Kota Cimahi	Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Forum/ Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga	17 Kegiatan dan 630 Orang 12 Kali = 500 Orang 1 Kali = 35 Orang 3 Kali @ 20 Orang = 60 Orang 1 Kali = 15 Orang	128.664.000	9 Kegiatan dan 305 Orang 6 Kali 250 Orang 0 2 Kali @ 20 Orang = 40 Orang 1 Kali = 15 Orang	52,9 % 50% 0% 67% 100 %	37.600.000	29,2 %	

			n, serta Penanganan Konflik di Daerah											
								28 Koordinasi	1.535.930.000	12 Koordinasi	42,9 %	493.037.000	32,1 %	
3, 2			SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksanan ya Koordinasi di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantaua n Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/K egiatan di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi Pertemuan Timdu PKS Kota Cimahi	18 Kali	6 Kali		33%				

			Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum, Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum, Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	Sewa gedung Bawaslu	Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan Tk. Kota Cimahi	Bantuan Keuangan Parpol	Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Tingkat Kota Cimahi	Monitoring dan evaluasi kegiatan parpol	Masyarakat/kelompok masyarakat/forum/organisasi kemasyarakatan/ lembaga parpol/instansi vertikal pelaksana pemilu	1 Unit/tahun	1 Kali = 50 Orang	10 Parpol dan 9000 Orang	1 Kali @ 100 Orang = 100 Orang	12 Kali	1 Unit/tahun	0	3 Parpol (Nasdem, PPP, PKB) dan 2050 Orang	0	0	Pos anggaran pendidikan politik perparpol target total 9000 Orang peserta
--	--	--	---	--	---	--	--	---------------------	--	-------------------------	--	---	---	--------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	---------	--------------	---	--	---	---	---

			Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
								114 Kegiatan dan 5100 Orang	494.106.100	39 Kegiatan dan 1776 Orang	35%	251.435.000	51%	
5	8.01.04	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Verifikasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Cimahi		12 Kali		4 Kali	33%			
			SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya	Terlaksananya Kebijakan/Kegiatan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberday	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	Pelatihan bagi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Cimahi	Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Forum/ Organisasi Kemasyarakatan	1 Kali = 50 Ormas (100 orang peserta)		1 Kali = 50 Ormas (76 orang peserta)	76%			
						Pengelola aplikasi sistem layanan keormasan		1 Orang		0	0%			

			an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	aan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan		100 Ormas = 5000 Orang		34 Ormas = 1700 Orang	34%			
6	8.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota							5.383.210.9 58		47,0 6%	1.528.063.8 79	28,3 9%	
			Perencanaa n, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya a Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	5.850.000	1 Dokumen	50%	3.037.500	51,9 2%	
				Terlaksanan ya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan Evaluasi Kinerja	3.388.500	6 Laporan Evaluasi Kinerja	50%	2.988.500	88,2 0%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		25 ASN	4.845.244.5 08	16 ASN	64%	1.329.013.1 53	27,4 3%	
				- Tersedianya laporan - Tersedianya honorarium THL penyusun laporan	- Jumlah laporan tahunan/sem esteran - Jumlah THL operator pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		- 2 laporan keuangan tahunan/sem esteran - 1 Org THL operator pelaporan	83.080.000	- 0 laporan keuangan tahunan/sem esteran - 1 Org THL operator pelaporan	33%	34.102.954	41,0 5%	
			Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Terlaksanan ya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		20 ASN	81.573.000	0	0%	0	0,00 %	

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan peralatan kantor (1 Paket ATK dan 1 Paket Unit Printer)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		- 1 Paket ATK - 1 Paket Unit Printer	53.109.900	1 Paket ATK	50%	19.558.850	36,83%	
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	37.329.000	6 Bulan	50%	17.332.000	46,43%	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	14.734.850	6 Bulan	50%	3.850.250	26,13%	
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0	0	0	0%	0	0%	
				Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	116.523.000	6 Bulan	50%	54.674.121	46,92%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana prasarana gedung Arsip	Jumlah unit sarana prasarana gedung arsip yang disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit/tahun	30.000.000	1 Unit/tahun	100%	29.500.000	98,33%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya sarana komunikasi, sumber	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	6.000.000	6 Bulan	50%	213.077	3,55%	

			Pemerintahan Daerah	daya air dan listrik	sumber daya air dan listrik							
				Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	16.220.000	6 Bulan	50%	2.550.000	15,72%
				Terlaksananya pelayanan umum/kebersihan kantor	- Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor - Jumlah petugas pelayanan umum/kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- 12 Bulan - 1 Org THL petugas pelayanan umum/kebersihan	42.783.200	- 6 Bulan - 1 Org THL petugas pelayanan umum/kebersihan	54%	17.470.474	40,83%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terpeliharanya kendaraan operasional 1 unit mobil dan 2 unit motor - Terfasilitasinya asuransi dan pajak kendaraan operasional	- Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan operasional - Jumlah unit kendaraan operasional yang dibayarkan asuransi dan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- 12 Bulan - 3 Unit	47.375.000	- 6 Bulan - 3 Unit	60%	13.773.000	29,07%
								10.356.357.208		47%	3.621.134.193	34,97%

TABEL 4.1
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI
RUMUSAN RENCANA PAGU PERUBAHAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/Berkurang
					Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	9
	TOTAL	:			12.418.395.000	39.038.983.165	26.620.588.165
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.015.674.150	7.108.215.765	1.092.541.615
8.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	187.953.900	192.972.900	5.019.000
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 dokumen	106.943.900	111.962.900	5.019.000
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2 Dokumen	2 dokumen	81.010.000	81.010.000	0
8.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 bulan	4.955.091.050	5.929.623.075	974.532.025
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 bulan	4.955.091.050	5.929.623.075	974.532.025
8.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Terbina dan Terfasilitasi	25 Orang	30 Orang	96.657.000	80.848.000	15.809.000
8.01.01.2.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	80.772.000	64.963.000	15.809.000
8.01.01.2.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	15.885.000	15.885.000	-

8.01.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum		12 bulan	370.971.800	514.545.790	143.573.990
8.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	5 Paket	121.351.400	232.847.990	111496590
8.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Paket	48.621.100	51.105.100	2484000
8.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Paket	26.012.300	28.183.700	2171400
8.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	175 Laporan	174.987.000	202.409.000	27422000
8.01.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 Unit Gudang Arsip	1 Unit	30.000.000	30.000.000	-
8.01.01.2.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	
8.01.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	187.490.800	172.716.400	- 14.774.400
8.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	1.200.000	0
8.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Laporan	4 Laporan	25.450.000	25.450.000	0
8.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	160.840.800	146.066.400	- 14.774.400
8.01.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	4 Unit	4 Unit	187.509.600	187.509.600	-
8.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	3 Unit	4 Unit	87.509.600	87.509.600	-
8.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit	100.000.000	100.000.000	-

8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan				1.173.561.700	1.173.561.700	-
8.01.02.2.0 1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang terbina kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga/Forum	1 Laporan 2040 Orang	1.173.561.700	1.173.561.700	-
8.01.02.2.0 1.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga/Forum	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	-
8.01.02.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga/Forum	280 Orang	552.031.000	552.031.000	-
8.01.02.2.0 1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga/Forum	1760 Orang	618.530.700	618.530.700	-
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				1.977.250.200	26.749.005.750	24.771.755.550

8.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Partai politik	1 Laporan	1.977.250.200	26.749.005.75 0	24.771.755.550
8.01.03.2.0 1.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Partai politik	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	-
8.01.03.2.0 1.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Partai politik	1 Laporan	8.000.000	8.000.000	-

8.01.03.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Partai politik	100 Orang	1.959.250.200	26.661.798.750	24.702.548.550
		Jumlah Lembaga/Parpol Penerima Bantuan Keuangan	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Partai politik	10 Parpol			
		Persentase Layanan Bawaslu yang terselesaikan	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Partai politik	100%			
8.01.03.2.0 1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Partai politik	25 Orang	2.500.000	71.707.000	69.207.000
8.01.03.2.0 1.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Partai politik	10 Laporan	2.500.000	2.500.000	-

		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				510.021.050	661.521.050	151.500.000
8.01.04.2.0 1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	masyarakat/kelompok masyarakat/Lembaga	1 Laporan	510.021.050	661.521.050	151.500.000
8.01.04.2.0 1.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	kelompok masyarakat/Lembaga	1 Laporan	4.800.000	6.500.000	1.700.000
8.01.04.2.0 1.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	kelompok masyarakat/Lembaga	1 Laporan	4.800.000	3.100.000	- 1.700.000
8.01.04.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	kelompok masyarakat/Lembaga	100 Orang	461.982.050	613.482.050	151.500.000

8.01.04.2.0 1.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	kelompok masyarakat/ Lembaga	5 Orang	30.100.000	30.100.000	-
8.01.04.2.0 1.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	kelompok masyarakat/ Lembaga	5 Laporan	8.339.000	8.339.000	-
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya				528.137.900	528.137.900	6.047.910.000
8.01.05.2.0 1	Kegiatan Perumusan kebijaksanaan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga/Forum	1 Laporan	528.137.900	528.137.900	6.047.910.000
8.01.05.2.0 1.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	masyarakat/kelo mpok masyarakat/ Lembaga/Forum	12 Laporan	3.189.700	3.189.700	3.023.955.000
8.01.05.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga/Forum	100 Orang	270.400.000	270.400.000	1.814.373.000

8.01.05.2.0 1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga/Forum	470 Orang	254.548.200	254.548.200	1.209.582.000
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				2.213.750.000	2.818.541.000	604.791.000
8.01.06.2.0 1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Kota Cimahi - Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Tk. Kota Cimahi - Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Forum	1 Laporan	2.213.750.000	2.818.541.000	604.791.000
8.01.06.2.0 1.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Kota Cimahi - Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Tk. Kota Cimahi - Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Forum	1 Laporan	5.300.000	5.300.000	-

8.01.06.2.0 1.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Kota Cimahi - Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Tk. Kota Cimahi - Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Forum	1 Laporan	6.200.000	6.200.000	-
---------------------	---	--	--	--------------	-----------	-----------	---